

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia”. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan yang berpusat pada pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan utama.

Selanjutnya pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonom, sehingga Indonesia juga disebut sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi akan diperoleh jika penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh pemerintah yang tingkatannya lebih rendah dan mandiri bersifat otonom.¹

Landasan dari penyelenggaraan asas desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang.

Otonomi daerah juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Nuria Siswi Enggarani, Analisis Otonomi Daerah dalam Menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, *Yustisia*, Volume 2, Nomor 2, 2012, hlm. 69

Pelaksanaan otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Tujuan dari adanya otonomi di pemerintah desa adalah untuk mempercepat proses pembangunan desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Guna melaksanakan pembangunan desa tersebut, maka pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan memperhatikan prinsip

² Yulia Devi R dan Eko Handoyo, Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah, *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 116

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman desa.³

Oleh sebab itu, pembangunan desa seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.⁴

Kegiatan pemberdayaan ini diharapkan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha masyarakat serta sumber daya alam di lingkungan tersebut.⁵ Pemberdayaan ini merupakan agenda pemerintah desa yang sangat penting, karena pemerintah desa merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, semakin baik pula peningkatan pembangunan desa dan pada akhirnya berpengaruh pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Upaya pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat harus ditujukan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat Desa, termasuk kelompok masyarakat minoritas seperti masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). Hal ini dikarenakan saat ini sudah banyak masyarakat SAD yang menetap di beberapa wilayah pedesaan, sehingga mereka menjadi tanggungjawab pemerintah desa termasuk kesejahteraan hidup masyarakat SAD.

³ Ita Ulumiyah., A.J. Andi Gani dan L.I. Mindarti, Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 5, 2019, hlm. 890

⁴ Yana Sahyana, Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat), *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Volume 9, Nomor 2, 2017, hlm. 157

⁵ Iroh, G.S, Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Volume 1, Nomor 5, 2016, hlm. 3

⁶ Botutihe, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, (Gorontalo: UNG Press, 2016), hlm. 21

Pemberdayaan masyarakat SAD ini sangat penting karena selama ini masyarakat SAD sering terisolir atau terasingkan dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Kelompok-kelompok SAD ini memiliki kehidupan yang masih jauh dari masyarakat pada umumnya, seperti tertinggal dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan tidak pernah terlibat dalam urusan pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat SAD memiliki kualitas kehidupan yang belum optimal.⁷

Selain itu, masyarakat SAD selama ini tinggal dalam wilayah yang terbelakang dari segala macam bentuk modernisasi dunia, sehingga sangat perlu untuk memperkenalkan perkembangan dunia termasuk perkembangan sistem pemerintahan desa. Meskipun tidak ada jaminan bahwa melibatkan SAD dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat terjadi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat SAD itu sendiri, tetapi setidaknya ini merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan mereka pada sistem pemerintahan desa dan negara ini.

Salah satu kelompok masyarakat SAD yang perlu mendapat upaya pemberdayaan dari pemerintah desa adalah masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data dari pemerintah Desa Pinang Tinggi, luas wilayah yang menjadi lokasi tempat tinggal masyarakat SAD di Dusun Tenggalung adalah 35 Ha dengan jumlah masyarakat SAD sebanyak 336 jiwa dan jumlah KK SAD sebanyak 84 KK.

⁷ Upik Yelianti., Amelia Dwi Fitri., Mulawarman dan Zulfanetty, Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Informal dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 di Desa Nyogan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Karya Abdi*, Volume 4, Nomor 3, 2020, hlm. 412

Masyarakat SAD Dusun Tenggalung ini merupakan suku asli Jambi yang berasal dari kerajaan Melayu Jambi sehingga nenek moyang mereka dahulu memiliki gelar “Raden”. Kemudian saat wilayah Jambi mengalami peperangan sehingga nenek moyang mereka menyisir ke hutan-hutan di wilayah Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota dan memilih menetap di hutan tersebut. Seiring perkembangan zaman, wilayah Pijoan mulai ramai sehingga nenek moyang masyarakat SAD Dusun Tenggalung memilih pindah ke wilayah Tempino. Namun karena di Tempino juga sudah mulai ramai oleh masyarakat umum, akhirnya mereka pindah kembali ke kawasan hutan Nyogan.⁸

Namun karena eksplorasi dan eksploitasi hutan yang semakin tinggi, akhirnya mempersempit ruang gerak dan mendesak habitat masyarakat SAD, baik dalam pengertian untuk hunian maupun ketersediaan makanan. Kondisi ini memaksa masyarakat SAD untuk menetap dan mengubah pola hidup nomaden. Akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara.⁹

Sebelum menetap di Dusun Tenggalung, masyarakat SAD ini bertempat tinggal secara berpindah-pindah (nomaden) hingga akhirnya mereka menetap di wilayah Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi. Setelah mereka menetap, maka pemerintah Desa Pinang Tinggi membantu dan mengupayakan penyediaan lahan sebagai lokasi tempat tinggal bagi masyarakat SAD. Menetapnya masyarakat SAD di Dusun Tenggalung tentu mengubah pola komunikasi dan interaksi yang

⁸ Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Dusun Tenggalung pada Tanggal 5 Novembe 2022

⁹ Hasil Observasi dan Wawancara dengan Kepala Dusun Tenggalung pada Tanggal 5 Novembe 2022

biasa dilakukan dengan komunitas, sekarang mulai beradaptasi dengan masyarakat sekitar.

Akan tetapi, masyarakat SAD Dusun Tenggalung ini tidak seberuntung masyarakat SAD di Bukit Duabelas Kabupaten Sarolangun yang selalu mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Hal ini dikarenakan masyarakat SAD Dusun Tenggalung hingga saat ini masih berusaha untuk memenuhi kesejahteraan hidup secara swadaya termasuk dalam mengembangkan wilayahnya. Bahkan untuk fasilitas listrik mereka baru mendapat pada awal tahun 2020 lalu, sedangkan apabila ada jalan atau jembatan rusak maka mereka akan melakukan secara swadaya dengan bergotong royong. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dialami oleh masyarakat SAD Dusun Tenggalung sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat SAD Dusun Tenggalung Tahun 2021

No	Permasalahan	Kondisi
1	Gedung sekolah	1 gedung sekolah dasar sekaligus menjadi aula umum yang

		disediakan pemerintah desa untuk masyarakat SAD
2	Tenaga pendidik	Ketersediaannya terbatas dan berasal dari luar Desa Pinang Tinggi
3	Fasilitas dan layanan kesehatan	Tidak ada
4	Fasilitas dan layanan ibadah	Tidak ada
5	Fasilitas dan layanan perekonomian	Tidak ada
6	Akses jalan	Rusak
7	Keterlibatan dalam lingkungan sosial masyarakat dan pemerintahan	Kurang

Sumber : Hasil Observasi (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat SAD Dusun Tenggalung adalah soal pendidikan, kesehatan, keagamaan dan keterlibatan dalam lingkungan sosial masyarakat, dimana permasalahan tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat SAD untuk menstarakan hidup dengan masyarakat umum dan keberdayaan mereka untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan masyarakat. Permasalahan pertama mengenai keterbatasan fasilitas pendidikan, dimana saat ini masyarakat SAD Dusun Tenggalung memang sudah memperoleh fasilitas sekolah tingkat dasar atau setara SD yang disebut sebagai “Sekolah Terbang” karena tenaga pendidik atau gurunya berasal dari luar Desa dan tidak menetap mengajar di sekolah tersebut. Kegiatan

pembalajaran untuk anak-anak SAD ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu, tapi terkadang tenaga pendidiknya justru tidak hadir. Kondisi ini tentu menyebabkan keberdayaan masyarakat SAD dari aspek pendidikan masih kurang.

Selain itu, dibidang kesehatan juga belum ada puskesmas pembantu maupun tenaga kesehatan yang secara khusus disediakan untuk melayani masyarakat SAD Dusun Tenggalung. Kemudian guru mengaji juga tidak ada padahal mayoritas masyarakat SAD Dusun Tenggalung saat ini muslim dan sangat membutuhkan guru mengaji untuk mengajari anak-anak mereka. Artinya masyarakat SAD belum berdaya untuk memperoleh fasilitas dan layanan kesehatan dan keagamaan secara mudah, sehingga akses kesehatan dan ibadah bagi masyarakat SAD masih sangat terbatas. Apabila mereka harus bergabung dengan fasilitas kesehatan dan keagamaan masyarakat umum, maka ada beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti jarak tempat tinggal masyarakat SAD dengan masyarakat umum yang cukup jauh, serta masih ada masyarakat umum yang merasa kurang nyaman untuk berdampingan secara langsung dengan masyarakat SAD.

Adanya beberapa persoalan tersebut, maka secara umum kesejahteraan hidup masyarakat SAD Dusun Tenggalung belum tercapai dengan baik dan kemandirian masyarakat SAD juga belum terwujud. Namun sampai saat ini, pemerintah desa sendiri belum ada melakukan pembinaan secara khusus dan lebih spesifik atau intens kepada masyarakat SAD. Kondisi ini tentu membutuhkan upaya yang lebih keras dari pemerintah desa agar pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung dapat ditingkatkan, sehingga taraf kehidupan dan kesejahteraan mereka meningkat.

Pada dasarnya ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Penelitian Ridwan dan Lesmana yang berjudul “Model Pemberdayaan Suku Anak Dalam Bidang Kesehatan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan bidang kesehatan kepada SAD di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari meliputi melakukan pelatihan kader, pergerakan masyarakat SAD, edukasi kesehatan bagi masyarakat dan kader. Selanjutnya pemberdayaan juga dilakukan dengan mengajak seluruh masyarakat SAD untuk terlibat aktif dalam bidang kesehatan yang dilakukan.¹⁰

Penelitian Syahrowi dkk dengan judul “Peran Dinas Sosial Sarolangun dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) untuk Memenuhi Kebutuhan Primer”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dilakukan dalam tahap penyadaran dengan cara memberikan pengetahuan tentang memakai pakaian modern, pentingnya hidup menetap, tidak bisa selamanya bergantung pada hutan. Tahap pengkapasitasan dilakukan dengan mengadakan pelatihan tentang bercocok tanam atau bertani.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara”**.

¹⁰ M. Ridwan dan Oka Lesmana, Model Pemberdayaan Suku Anak Dalam Bidang Kesehatan di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, *Jurnal Kesmas Jambi*, Volume 2, Nomor 2, 2018

¹¹ Syahrowi., Awis Karni dan Irta Sulastri, Peran Dinas Sosial Sarolangun dalam Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) untuk Memenuhi Kebutuhan Primer, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Volume 7, Nomor 1, 2021

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan menjadi masukan dalam pemberdayaan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman dan mengevaluasi program pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Pemberdayaan

Teori merupakan suatu konsep, definisi dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis mengenai suatu obyek. Apabila dikaitkan dengan pemberdayaan, maka teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Pada arti luas, teori pemberdayaan menggambarkan mengenai pola-pola interaksi dalam masyarakat atau menggambarkan pola yang terjadi pada situasi tertentu.¹²

Teori dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditemukan atau diungkapkan menggunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan *Deductive Theory Construction* yaitu teori yang sudah ada atau ditemukan diawal, kemudian dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat.

¹² Karjuni D.T. Maani, Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Demokrasi*, Volume X, Nomor 1, 2011, hlm. 55

b. Pendekatan kedua yaitu *constructive theory* adalah teori yang belum ada atau masih diduga dan untuk menyusunnya dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat.¹³

Dari dua pendekatan tersebut, maka teori yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemberdayaan sebagai berikut:¹⁴

a. Teori ketergantungan kekuasaan (*power-dependency*)

Teori ini dikembangkan oleh Nicollo Machiavelli dan Thomas Hobbes pada abad ke-16-17. Berdasarkan teori ini, pemberdayaan dilakukan untuk menghindari adanya power atau kekuasaan dari kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemberdayaan dengan pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (*equality*), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan. Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka keberhasilannya akan rendah.

b. Teori Sistem (*The Social System*)

Teori ini diciptakan oleh Talcott Parsons pada tahun 1991. Pada teori ini, pemberdayaan dianggap sebagai bentuk untuk melakukan perubahan sosial pada masyarakat. Teori ini menyebutkan bahwa empat fungsi yang harus dimiliki agar proses pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar, yaitu adaptasi, pencapaian, integrasi dan pemeliharaan pola.

c. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, (Bandung: Humaniora, 2016), hlm.

Berdasarkan teori ini, pemberdayaan ditujukan kepada kelompok-kelompok yang dianggap masih memiliki kondisi lemah atau dibawah rata-rata kelompok lainnya. Pada hal ini kelompok lemah harus diberdayakan agar tumbuh menjadi kelompok yang kuat dan memiliki sistem yang berkelanjutan.

d. Teori Konflik

Pada proses pemberdayaan yang dilakukan disuatu lingkungan sosial akan sangat sering menemui konflik, dimana konflik ini muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap perubahan, sehingga hal ini harus diatasi dan diupayakan agar perubahan tersebut benar-benar terwujud.

e. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Teori ini menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan pemberdayaan, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya harus memiliki power, berupa modal sosial dan modal capital.

f. Teori *Constructivist*

Teori ini disebut juga sebagai teori belajar, dimana dalam pemberdayaan itu seharusnya masyarakat diajari untuk menjadi mandiri. Oleh karena itu, pada teori *constructive* ini pengetahuan, pengalaman, keterampilan menjadi sasaran utama agar pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

1.5.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan proses dimana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan.¹⁵

Pemberdayaan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan empowerment merupakan sebuah konsep yang muncul pada akhir tahun 70-an di daerah Eropa dan terus berkembang hingga saat ini. Pada awal mulanya, konsep pemberdayaan mengacu kepada sebuah upaya pemberian wewenang, tanggungjawab dan kepercayaan kepada setiap individu masyarakat agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.¹⁶

Pada dasarnya konsep pemberdayaan dapat mendukung terciptanya kemandirian dalam masyarakat, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi tiap-tiap individu masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah kegiatan peningkatan prakarsa dan

¹⁵ Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Pusaka Cisendo, 2016), hlm. 146

¹⁶ Ife, J., dan Tesoriero, F, *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020), hlm. 31

swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, serta kegiatan peningkatan kemampuan masyarakat.¹⁷

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan dilibatkannya masyarakat disemua tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu prinsip yang berperan penting dalam suatu pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama pengembangan.¹⁸ Pemberdayaan masyarakat pada umumnya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki maupun meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada program pemberdayaan, masyarakat bukan hanya dilatih untuk meningkatkan kapasitas dirinya, akan tetapi juga dilatih agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada disekitarnya, sehingga dapat bermanfaat ataupun memiliki nilai jual. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan dampak pada 3 aspek, yaitu:

- a. Dampak sosial, meliputi gaya hidup, interaksi sosial, keamanan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Dampak ekonomi, meliputi rumah, kendaraan, perlengkapan/perabotan rumah.
- c. Dampak lingkungan, meliputi lingkungan yang aman dan nyaman, serta sumber daya alam terpenuhi.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32

¹⁸ Saifuddin Yunu, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 6

¹⁹ *Ibid.* hlm. 61

Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan mengingat banyak sekali terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Ketimpangan yang sering terjadi dimasyarakat meliputi:

- a. Ketimpangan structural yang terjadi diantara kelompok primer, seperti perbedaan kelas antara orang kaya dengan orang miskin, dan antara buruh dengan majikan, ketidak setaraan gender, perbedaan ras dan lain sebagainya.
- b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, isolasi geografis dan sosial (ketertinggalan dan keterbelakangan).
- c. Ketimpangan personal akibat kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi dan keluarga.²⁰

Ketimpangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun cara untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberi akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas.²¹

Dari hal tersebut, maka upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 aspek, yaitu:

- a. *Enabling*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak orang atau masyarakat tanpa daya.

²⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 23

²¹ *Ibid.* hlm. 23-24

- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok adalah meningkatkan pendidikan formal maupun non formal, memberikan akses kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana dasar, memberikan motivasi dan bimbingan lain sebagainya
- c. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional. Artinya dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu kebijakan atau peraturan yang dapat melindungi masyarakat lemah.²²

Suatu pemberdayaan masyarakat tentu memiliki beberapa tahapan atau proses yang memiliki tujuan agar pemberdayaan yang dilakukan telah direncanakan dengan matang sehingga memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Pemberdayaan masyarakat juga harus melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:²³

- a. Tahap Persiapan

Ada dua hal yang harus dipersiapkan pada tahapan ini, yaitu petugas dan lapangan. Persiapan petugas dimaksudkan agar petugas yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pemberdayaan adalah orang yang berkompeten dan sesuai dengan bidangnya. Adapun persiapan lapangan yaitu berkaitan dengan tempat, subjek dan objek yang akan dijadikan sebagai sasaran dalam pelaksanaan pemberdayaan. Apakah suatu daerah dan masyarakatnya patut untuk diberdayakan. Persiapan lapangan juga disertai dengan adanya perizinan yang diberikan oleh objek sasaran kepada petugas, sehingga

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 26

pemberdayaan dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

b. Tahap Pengkajian

Tahapan ini berfokus untuk menelaah dan mengkaji permasalahan apa yang tengah dihadapi oleh masyarakat, atau adakah kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi karena ketidakmampuan atau keterbatasan masyarakat. pada tahapan ini, maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya, sehingga petugas dapat menyusun perencanaan sesuai dengan skala prioritasnya.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Kegiatan

Apabila skala priotas telah ditetapkan, maka petugas akan melibatkan masyarakat untuk merumuskan beberapa alternatif solusi baik berbentuk kebijakan, program, kegiatan ataupun bentuk solusi alternatif lainnya yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai jalan keluar atas permasalahan yang tengah terjadi.

d. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini, maka alternatif solusi yang telah dirumuskan sebelumnya mulai disiapkan untuk dilaksanakan, baik dari segi sumber daya, anggaran, petugas pelaksana, bentuk pelaksanaannya, serta hal-hal lain yang diperlukan selama pelaksanaan pemberdayaan. Pada tahapan ini, seluruh pihak yang terlibat baik petugas maupun masyarakat juga bersama-

e. Tahap Implementasi Kegiatan

Pada tahapan ini maka alternatif yang telah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya dilaksanakan. Pada tahapan ini juga dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar seluruh pihak yang terlibat. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dilengkapi dengan kerjasama yang baik, maka dapat meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan program.

f. Tahap Evaluasi

Tahapan ini merupakan sebuah proses pengawasan yang melibatkan masyarakat dan staf selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Pada tahapan ini, maka akan dilakukan penilaian apakah pemberdayaan yang dilaksanakan telah tepat sasaran, telah mencapai tujuan, atau mengalami kegagalan karena beberapa hambatan.

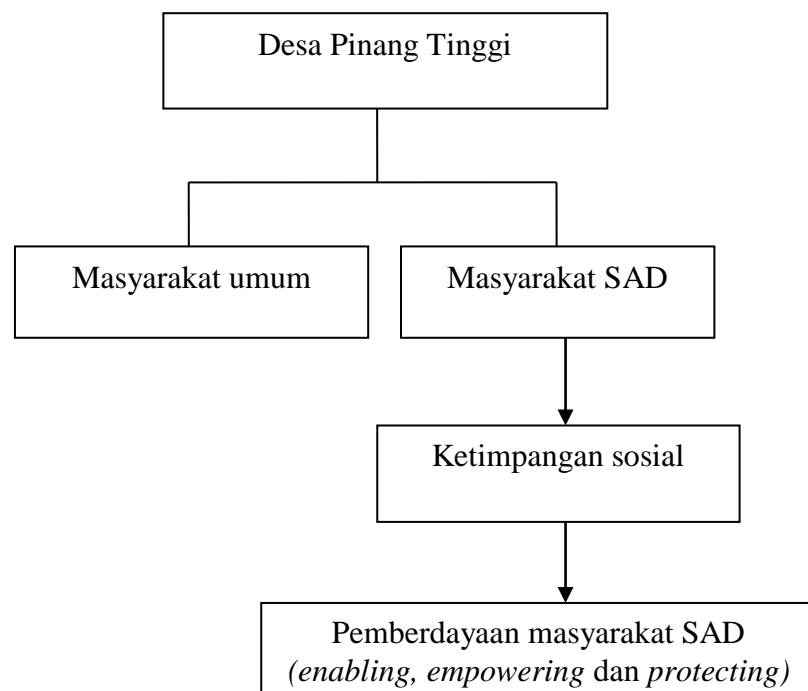
Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Masyarakat dijadikan sebagai tolak ukur normative, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga dan bahkan bangsa sebagai aktualiasasi kemanusiaan yang adil dan beradab.²⁴

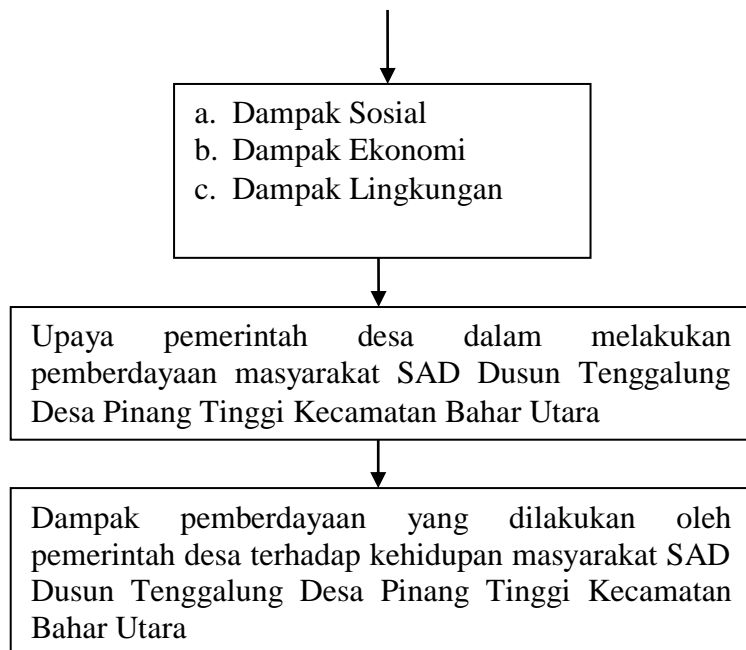
1.6. Kerangka Pemikiran

Desa Pinang Tinggi merupakan salah satu desa di Kecamatan Bahar Utara, dimana desa ini terdiri dari beberapa dusun dan salah satunya adalah Dusun Tenggalung. Dusun Tenggalung ini tidak hanya dihuni oleh masyarakat umum,

²⁴ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: Dela Macca Press, 2018), hlm. 11

tetapi juga masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang menetap dipedalaman Dusun Tenggalung. Artinya masyarakat SAD ini memiliki pemukiman yang terpisah dari masyarakat umum di Dusun Tenggalung dan hanya dihuni oleh kelompok SAD itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial antara masyarakat SAD dengan masyarakat umum yang ada di Dusun Tenggalung. Oleh karena itu, pemerintah desa juga harus melakukan pemberdayaan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat SAD, sehingga memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:





Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara pandang peneliti dalam mengadopsi desain kualitatif dengan melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung.²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena di Dusun Tenggalung terdapat masyarakat SAD yang sampai saat ini masih berada dalam kondisi tertinggal dari kehidupan modern.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi sumber pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, catatan Kecamatan, literature dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan ciri-ciri tertentu.²⁶ Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang memahami mengenai upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara sebanyak 1 orang.
2. Kepala Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara sebanyak 1 orang.
3. Ketua adat masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara sebanyak 1 orang.
4. Masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara sebanyak 2 orang.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ *Ibid.* hlm. 288

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan tertutup mengenai upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung mengenai kondisi objek penelitian. Pada kegiatan observasi ini, peneliti mengamati dan melihat secara langsung kondisi kehidupan masyarakat SAD, serta upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat SAD Dusun Tenggalung Desa Pinang Tinggi Kecamatan Bahar Utara.

c. Dokumentasi

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan, untuk mengambil data yang akurat dengan metode pengambilan gambar dan data-data tertulis untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami dan temuannya

dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:²⁷

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.²⁸

b. Penyajian data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.²⁹

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari

²⁷ *Ibid.* hlm. 348

²⁸ *Ibid.* hlm. 274

²⁹ *Ibid.*

penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.³⁰

1.7.8. Triangulasi Data

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Dalam penelitian dapat dipergunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses varifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

b. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan.

c. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau

³⁰ *Ibid.*

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

d. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.